

# **Wawasan Kebangsaan : Penglihatan Politis – Historis**

## **1. Pendahuluan : Dari mana Kita Berangkat ?**

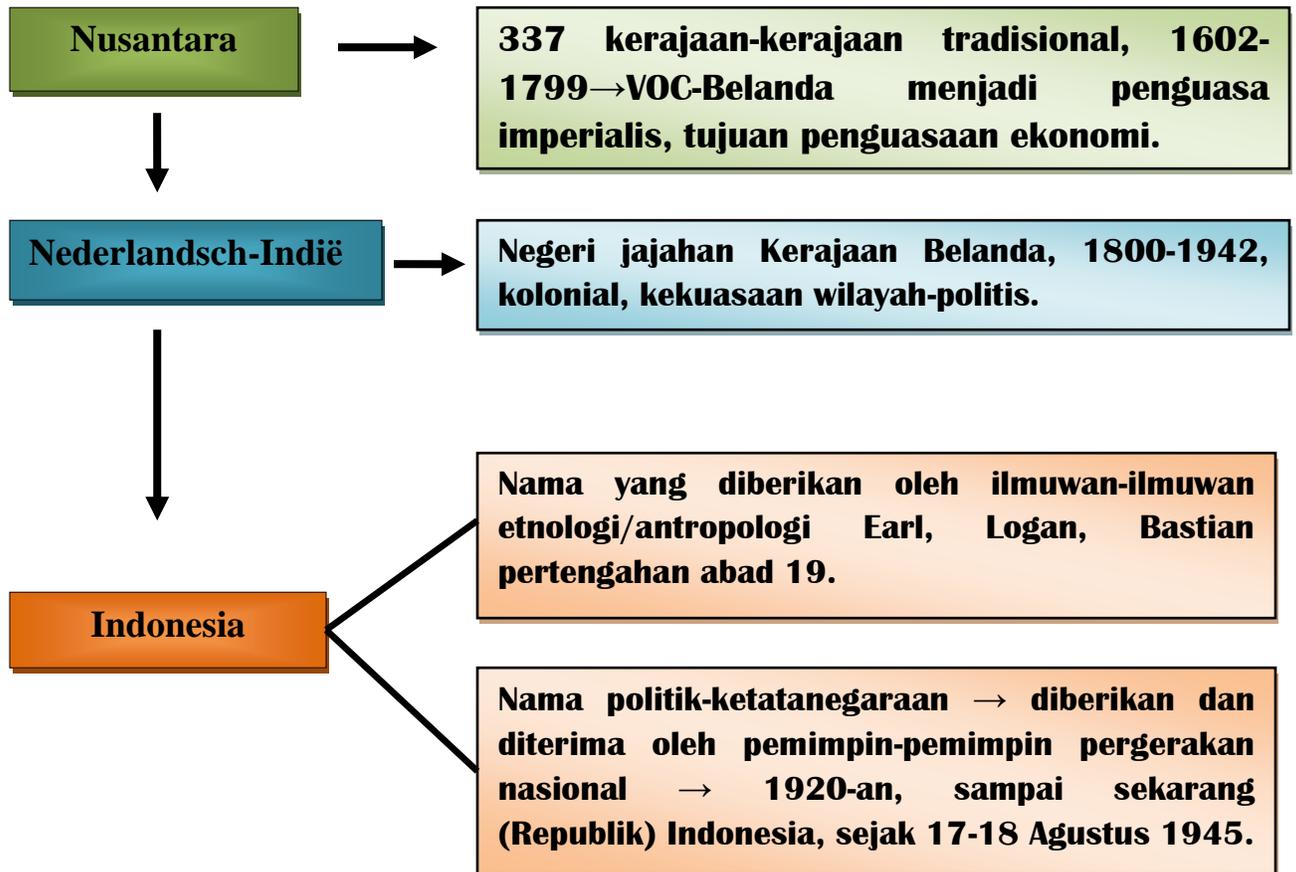
**Oleh : Dr. Anhar Gonggong  
Ilmuan Sejarah, Tenaga  
Profesional Lemhannas RI**

Kalau kita mau jujur pada diri kita, maka sebenarnya ketika membicarakan tentang diri kita dalam arti ke-Indonesiaan kita, maka tidaklah mudah, sebagaimana yang mungkin diduga orang. Yang pertama mungkin dipertanyakan ialah penamaan diri kita sebagai kolektiva bangsa, Indonesia. Karena sebelum kolektiva diri kita disebut Indonesia, maka di seluruh kepulauan yang kini menjadi dan dinamakan Indonesia, telah bertegak sekian banyak wilayah yang menyebut diri mereka sebagai “negara” dalam arti kerajaan-kerajaan tradisional. Sebelum negeri kita bernama Indonesia, dan oleh Vlekké masih disebut Nusantara, di dalamnya terdapat ±337 kerajaan-kerajaan tradisional dengan aturan-aturan kenegaraan kerajaan masing-masing.

Di dalam perkembangannya kemudian, memasuki awal abad ke-20, maka proses penetapan penggunaan nama diri dari warga anak negeri jajahan yang ketika itu – sejak 1800 – disebut Nederlandsch-Indië (Hindia Belanda) dilakukan oleh warga anak negeri jajahan yang terdidik-tercerahkan. Kesadaran baru yang secara embriotik diawali dengan kelahiran Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908. Tetapi proses penggunaan nama negeri, tanah air dan nama diri sebagai bangsa baru : Indonesia dimulai pada awal tahun 1920-an. Kesadaran baru untuk mencari sebuah nama diri baru diawali dengan pembuangan politik pemerintah kolonial Belanda terhadap diri Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat (yang kemudian lebih dikenal dengan nama ketokohnya sebagai pendidik : Ki Hadjar Dewantara) ke negeri penjajah : Kerajaan Belanda. Di negeri kolonialis ini telah ada organisasi yang dimiliki oleh warga anak negeri jajahan yang menetap di Kerajaan Belanda dengan nama : Indische Vereniging. Perkumpulan ini pada mulanya tidak memperhatikan masalah-masalah politik, hanya berusaha untuk mempererat tali perkawanan-persaudaraan sesama pelajar Hindia Belanda yang ada di Kerajaan Belanda. Tetapi kemudian setelah Ki Hadjar Dewantara memasuki lingkungan organisasi ini dan “menyuntikkan” virus baru ke dalam tubuhnya, maka secara berangsur lahirlah kesadaran baru di lingkungan

organisasi ini; namanya kemudian berubah menjadi Indonesische Vereniging dan bahkan kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia.

Berdasar keterangan di atas maka nama negeri kita dahulu dan selanjutnya sekarang, melalui tiga proses dalam kurun waktu yang panjang, yaitu



Dengan keterangan singkat di atas, maka agaknya kita dapat memulai pembicaraan kita tentang :

## 2. Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme

Ketika kita berbicara tentang wawasan yang kemudian dikaitkan dengan kata kebangsaan, maka itu berkaitan dengan cara pandang suatu bangsa baik dalam kaitan dengan cara pandang terhadap dirinya maupun cara pandangnya terhadap orang, bangsa lain. Dari buku “resmi” keluaran Lemhanas RI, wawasan terkait dengan tiga kata lainnya, yaitu Wawasan Kebangsaan, Wawasan Nasional dan Wawasan Nusantara. Menurut buku Lemhanas RI itu Wawasan Kebangsaan ialah “suatu pandangan atau paham tentang dinamika fenomena kehidupan dari

kelompok masyarakat yang berhimpun sebagai suatu bangsa yang memiliki nilai-nilai kebangsaan yang sama”. Sedang Wawasan Nasional diartikan “cara pandang suatu bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam hubungan antar negara yang merupakan hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya dengan memperhatikan sejarah dan kondisi sosial budaya serta memanfaatkan konstruksi geografi guna menciptakan dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai Tujuan Nasional (lihat, *Materi Dasar Wawasan Nusantara dan Implementasinya*, Jakarta, 2015, hal. 14-15). Dan istilah Wawasan Nusantara diartikan “cara pandang bangsa Indonesia yang berlingkup dan demi kepentingan nasional yang berlandaskan Pancasila tentang diri dan lingkungannya, serta tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupannya yang beragam dan dinamis dengan mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia, yang tetap menghargai dan menghormati kebhinnekaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*Ibid.*).

Lahirnya wawasan-wawasan itu, sebenarnya telah berkembang dan itu diawali ketika sejumlah warga anak negeri jajahan Hindia Belanda (*Nederlandsch-indië*) yang karena mendapatkan ruang pendidikan pada akhir abad 19 – antara lain, 1901, politik etis – yang kemudian memasuki awal abad ke-20, melahirkan sejumlah anak negeri jajahan itu menjadi anak negeri “yang terdidik-tercerahkan”. Mereka inilah yang menggugah cara baru untuk melakukan perlawanan terhadap sistem kehidupan “bersama” yang dicipta-jalankan oleh penguasa yang imperialis-kolonialistik. Periode perlawanan dengan cara baru ini – disebut Pergerakan Nasional, atau oleh Mohammad Hatta disebut sebagai Pergerakan Kebangsaan, juga disebut Pergerakan Kemerdekaan (lihat Mohammad Hatta, Toedjoen dan Politik Pergerakan Nasional di Indonesia, Indonesia Sekarang, Jogjakarta, 1946, hal. 14), telah berlangsung dalam suatu kurun waktu  $\pm 37$  tahun.

Kalau kita memperhatikan kehidupan bersama kita, maka sebenarnya ada tiga periode yang harus kita pahami sebagai perjalanan sejarah kebangsaan-kenegaraan kita. Periode “Nusantara” dengan isi 337 kerajaan tradisional dengan sistem kehidupannya masing-masing. Dalam periode itu sering terjadi konflik internal lingkungan kerajaan tertentu yang sering dipicu oleh persoalan sistem suksesi, pergantian raja/sultan dari kerajaan yang bersangkutan; juga tidak jarang terjadinya konflik antar kerajaan dengan pelbagai latarbelakang. Kemudian disusul dengan periode imperialisme/kolonialisme yang diawali dengan VOC, 1602 dan berakhir pada 1800; tetapi kemudian disambung dengan periode kolonial Kerajaan Belanda, 1800-1942. Kemudian disambung dengan pergantian penjajahan oleh

bangsa Asia yang kolonialis-fasis, Jepang. Dan selanjutnya pada 17/18 Agustus 1945 anak negeri jajahan yang berjuang dalam periode Pergerakan Nasional Kemerdekaan berhasil memproklamasikan kemerdekaan bangsanya pada 17 Agustus 1945 untuk kemudian menegakkan sebuah negara merdeka pada 18 Agustus 1945 dengan nama : Republik Indonesia.

Dengan merdekanya kita sebagai bangsa pada tanggal 17 Agustus `1945 dan menegakkan negara merdeka, Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 maka tujuan dari pergerakan – Kemerdekaan Indonesia – 1908-1942 – telah berhasil, dan keberhasilan itu disebutkan dalam dokumen historis kenegaraan kita, Pembukaan UUD 1945 alinea ke-2, yakni :

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”

Kalau kita memperhatikan rangkaian kata-kalimat alinea ke-2 itu, maka yang terbaca bukan hanya hasil dari perjuangan pergerakan kemerdekaan melainkan juga “tujuan” kita merdeka-bernegara, yaitu untuk mewujudkan adil dan makmur.

Agar supaya pengaturan kehidupan bersama sebagai bangsa merdeka di dalam negara merdeka pula, maka kita, sebagai bangsa merdeka harus menciptakan dan menentukan hak dan kewajiban kita sebagai bangsa negara merdeka. Hal-hal itu secara jelas dan pasti ditentukan di dalam sebuah konstitusi yang dirumuskan secara bersama oleh sebuah lembaga yang ditugasi oleh lembaga negara yang berhak. Pancasila yang disepakati sebagai dasar-filosofi negara kita (tentang hal ini lihat Pidato Promotor Prof. Mr. Drs. Notonegoro, Pancasila Dasar Filosofi Negara Republik Indonesia (Penerbitan Pancasila Nomor Pertama, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1957, passim) telah dirumuskan melalui proses tiga kegiatan oleh tiga lembaga yang ditugasi untuk merumuskannya.

## Wawasan Kebangsaan - Nasionalisme

### Nusantara

1. 337 Kerajaan
2. Konflik
  - a. Internal → persoalan suksesi
  - b. Antar kerajaan : antar kerajaan - kerajaan lokal

### Imperialis/Kolonialis

#### Belanda/Inggris

1. Imperialis Belanda, VOC, 1602-1800 → penaklukan kerajaan-kerajaan tradisional untuk kekuasaan ekonomi
2. Kolonialis Kerajaan Belanda, 1800-1811
3. Kolonialis Inggris, 1811-1816
4. Kolonialis Belanda 1816-1842
5. Kolonialis Jepang, 1942-1945 → BPUPK, Perumusan Pancasila oleh Ir. Soekarno, 1 Juni 1945 → 22 Juni 1945, rumusan Piagam Jakarta.

### Republik Indonesia

1. Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945
2. Sidang PPKI, 18 Agustus 1945 menegakkan negara : Republik Indonesia → Presiden Ir. Soekarno Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta
3. Transisi Perang Kemerdekaan → 1945-1949 → KMB, 27 Desember 1949 → RIS
4. 1950 → NKRI → UUD Sementara 1950 → Parlementer → Demokrasi - Liberal
5. 1960-1965-1966 → Demokrasi Terpimpin → Kabinet Presidensial
6. 1971-1998 → Demokrasi Pancasila → Kabinet Presidensial → Presiden dipilih oleh MPR tanpa batas waktu keterpilihan.
7. 1999-2017-sekarang → Demokrasi (Reformasi)

## Perumusan Pancasila menjadi Dasar Filsafat Negara

### Sidang BPUPK,

**1 Juni 1945** → Anggota Ir. Soekarno, intelektual, pemimpin bangsa Indonesia : merumuskan Pancasila sebagai jawaban kepada Ketua BPUPK, Dr. Radjiman Wedyodiningrat tentang apa dasar negara, jika kelak kita merdeka.

#### Rumusannya :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme - atau Peri-Kemanusiaan
3. Mufakat - atau demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan (berkeadaban, berkebudayaan)

### Sidang Panitia Kecil

Ketua Ir. Soekarno/Wakil Ketua Drs. Mohammad Hatta, 22 Juni 1945. Hasil Rumusan dua kelompok : Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Islami, adalah

1. Ketuhanan dengan kerakyatan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

### Sidang PPKI,

**18 Agustus 1945**, Ketua Ir. Soekarno, Wakil Ketua, Drs. Mohammad Hatta.

#### Rumusannya :

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kalau kita memperhatikan rumusan-rumusan dari Pancasila sebagai dasar-filsafat negara, maka tampak bahwa peranan Ir. Soekarno, sejak awal telah menunjukkan posisi amat penting. Dikatakan demikian karena konsep dari jawaban atas pertanyaan dari Ketua BPUPK – yang juga memimpin sidang tertanggal 1 Juni 1945 – yang diberinya nama : Pancasila, telah menjadi konsep “satu-satunya” yang menjadi bahan perdebatan di antara anggota-anggota BPUPK. Terjadinya perbedaan antara dua kelompok anggota BPUPK – kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islami – maka Dr. Radjiman Wedyodiningrat meminta kedua pihak untuk membentuk satu panitia untuk merumuskan “formula” kesepakatan mereka; panitia itu beranggotakan 9 orang dengan Ketua/Wakil Ketua Soekarno dan Hatta. Setelah Panitia Kecil itu melakukan rapat, maka pada tanggal 22 Juni 1945 mereka pun berhasil merumuskan formula yang disepakati bersama oleh anggota-anggota Panitia Kecil, yang oleh Mr. Muhammad Yamin disebut : Piagam Djakarta. Memang terjadi perbedaan susunan dan istilah tertentu yang berbeda dengan rumusan awal 1 Juni 1945 oleh Ir. Soekarno. Sila Ketuhanan tidak hanya dinaikkan menjadi sila pertama, melainkan juga menambahkan kata-kata yang menekankan kewajiban warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk “menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan pada esok harinya, 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) akan rapat untuk membicarakan “pembentukan negara Republik Indonesia” maka rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 itu melahirkan persoalan yang amat rumit dan tidak mudah untuk menyelesaikannya. Tentang hal ini, Drs. Mohammad Hatta memberikan kesaksiannya : “bahwa pada sore hari ia mendapatkan telpon dari tuan Nisyijama pembantu Admiral Maeda untuk bersedia menerima seorang opsir Kaigun, karena akan menyampaikan sesuatu yang penting. Opsir Jepang itu – Bung Hatta menyatakan lupa nama opsir itu – ternyata menyampaikan sikap penduduk Indonesia Timur yang beragama Kristen Protestan dan Katolik, kalau rumusan 7 kata dari Piagam Jakarta itu menjadi bagian dari Pembukaan UUD negara Republik. Opsir Jepang itu menyatakan bahwa isi dari Piagam Jakarta, sila pertama yang menyebutkan pengkhususan kewajiban rakyat Islam, dianggap sebagai “bentuk diskriminasi” terhadap minoritas Kristen Protestan dan Katolik. Terjadi juga dialog antara Bung Hatta dengan Opsir Jepang utusan rakyat Indonesia Timur itu (lihat, Mohammad Hatta, *Memoir “Terbitan Khusus Satu Abad Bung Hatta”* (Yayasan Hatta, Jakarta, 2002, hal. 458). Selanjutnya, karena adanya persoalan yang disampaikan oleh Opsir Jepang dari Indonesia Timur itu, maka Bung Hatta melakukan “pendekatan”

kepada pemimpin-pemimpin Islam pada tanggal 18 Agustus 1945, pagi hari sebelum sidang PPKI dimulai. Tentang hal ini, Bung Hatta menulis

“Karena begitu serius rupanya, esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan bermula, kuajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodinedjo dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagia kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut diwaktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa” (Ibid., hal. 459). Ketika memberikan keterangan tentang sikap pemimpin-pemimpin Islam di dalam bukunya itu, Bung Hatta memberinya sub judul : “Toleransi Pemimpin-Pemimpin Islam” (Ibid.).

Dalam penglihatan saya, cara penyelesaian persoalan yang dihadapi menjelang Proklamasi dan sesudah Proklamasi – termasuk dalam hal perubahan sila Ketuhanan pada Piagam Jakarta ke sila Ketuhanan yang tertulis di dalam Pembukaan UUD 1945, menunjukkan betapa para pemimpin kita menciptakan kesepakatan toleransi yang sebenarnya juga berdampak pada integrasi nasional. Demikian pula, kesepakatan yang dilandasi oleh pemahaman toleransi yang ditopang oleh persatuan bangsa, merupakan penopang utama terhadap tegaknya NKRI.

Selanjutnya bhinneka tunggal ika yang memang merupakan kenyataan diri kita, hanya dapat dipertahankan jika toleransi menjadi sikap utama kita bersama. Tetapi toleransi di situ dalam arti kita bersedia memberi, pada saat yang bersamaan kita harus pandai menerima kebhinnekaan kita adalah fakta dari keberadaan kita yang lahir dari kenyataan diri kita masing-masing dari kelompok etnik tertentu, menerima bangsa yang satu-bersatu, Indonesia dan hidup bersama di dalam wadah negara yang satu, Republik Indonesia. Kebersamaan hidup kita di dalam Republik Indonesia, NKRI berlandaskan pada dua “alat” pengatur yang utama, Pancasila dan UUD 1945.

Perlu pula ditambahkan bahwa jika kita menyebut bahwa Indonesia adalah tanah air kita, di mana kita hidup bersama maka pada dasarnya, tanah air ini – meminjam Dr. Daoed Yoesoef – ternyata merupakan persepsi politis-mistis mengenai data geografi dan manusiawi serta hubungan di antara keduanya. Artinya, perlakuan dan kecintaan orang terhadap tanah airnya masing-masing, di bagian manapun di dunia ini, kiranya mengambang antara Dichtung dan Warheit yang pada gilirannya sangat dipengaruhi oleh pelbagai peristiwa, situasi dan kondisi tertentu yang dialami pada suatu waktu tertentu. Dipandang dari sudut ini dapat dibedakan tiga jenis tanah air, yaitu tanah air riil, tanah air formal dan tanah air mental (Daoed Joesoef, *Pikiran & Gagasan 10 Wacana Tentang Aneka Kehidupan Bersama* (Kompas, Jakarta, hal. 9-10).

Menurut Daoed Joesoef yang dimaksud dengan tanah air riil adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka, berduka yang dialami secara fisis sehari-hari. Sedang tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar, dimana manusia menjadi salah seorang warganya yang membuat Undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata kehidupan bersama, Republik Indonesia, sedang yang dimaksud dengan tanah air mental tidak bersifat teritorial. Ia dapat dikatakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia lebih banyak berupa imajinasi ini dibentuk dan dibentuk dan dibina oleh ideologi. Maka itu kadang-kadang ia cenderung ke arah utopis, walaupun tidak metafisis (*Ibid.*, hal. 10). Adanya tiga jenis tanah air yang disebut oleh Dr. Daoed Joesoef itu mungkin dapat melengkapi cara pandang kita terhadap diri kita dan juga terhadap orang atau bangsa-negara lain.

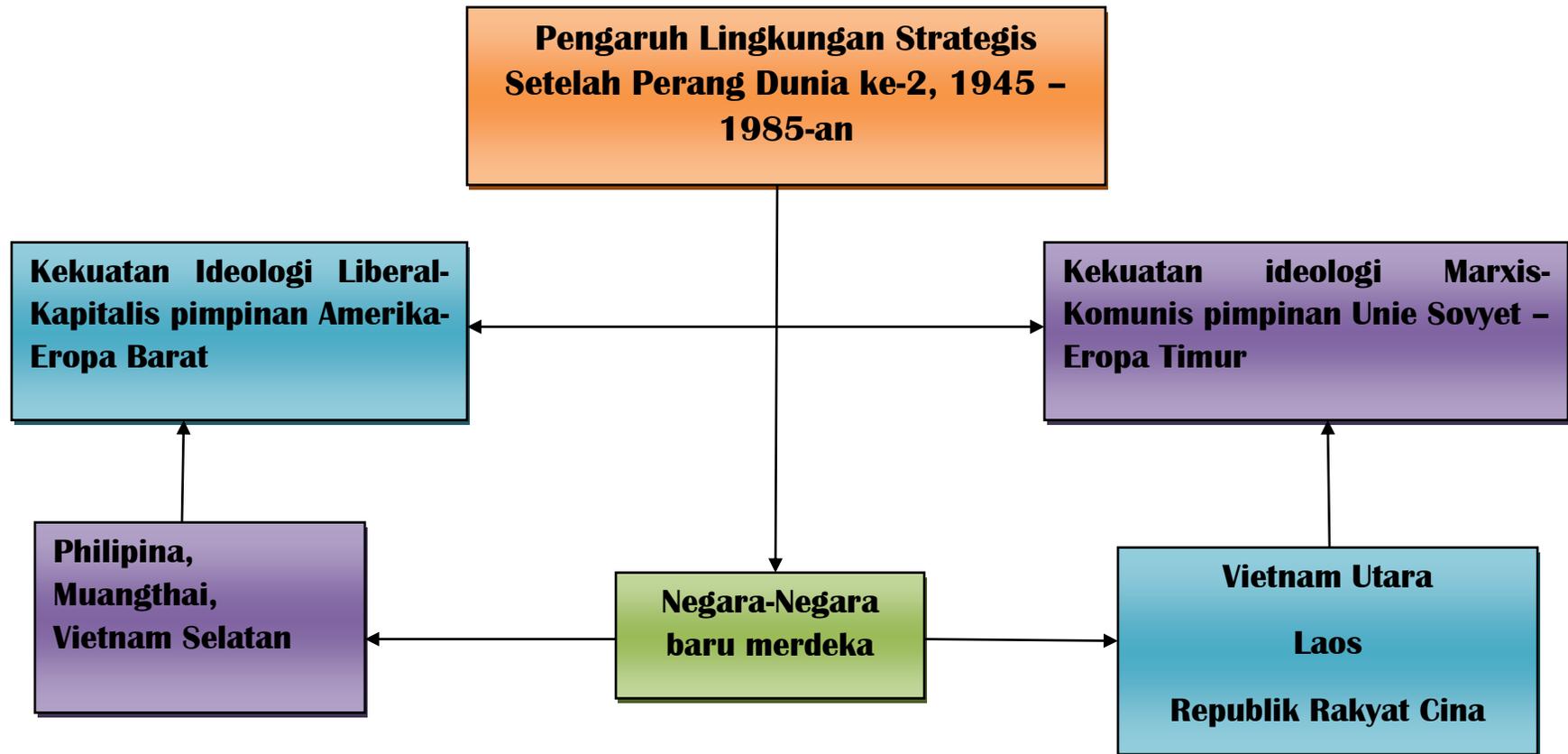
### **3. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis**

Jika kita menggunakan penglihatan historis-politis maka perkembangan lingkungan strategis telah mengalami perubahan-perubahan yang mendasar dengan pengaruhnya masing-masing. Sebagai contoh mungkin masih dekat dengan diri kita ialah pecah dan berakhirnya Perang Dunia ke-2. Lingkungan strategis berubah oleh karena berakhirnya Perang Dunia justru melahirkan apa yang dikenal dengan Perang Dingin yang terwujud dalam bentuk perang ideologi, yaitu persaingan antara Kekuatan Ideologi Liberal-Kapitalis VS Kekuatan Ideologi Marxis-Komunisme. Dampak selanjutnya dari berakhirnya Perang Dunia ke-2 ialah makin banyaknya bangsa-bangsa terjajah yang menjadi merdeka, termasuk bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mendirikan negara Republik Indonesia.

Kedua perubahan mondial strategis yang disebutkan di atas di dalam perkembangannya kemudian ternyata mempunyai kaitan pada batas tertentu. Hal ini terjadi karena kedua (pusat) kekuatan ideologi yang saling bersaing itu berusaha mendapatkan dukungan dari negara baru merdeka (dunia ke-3). Dan dalam batas tertentu, usaha dari kekuatan ideologi itu berhasil dan memberikan pengaruh baik pada lingkungan wilayah regional maupun secara nasional. Pada periode 1945 sampai 1985-an dan 1998 lingkungan regional Asia Tenggara – bahkan Asia-Afrika – terbelah dalam tiga kekuatan; Filipina-Muangthai berada di bawah pengaruh ideologi liberal-kapitalistik yang dipimpin oleh Amerika-Eropa Barat. Sedangkan Vietnam Utara berada di bawah pengaruh Unie Sovyet-Eropa Timur yang berideologi Marxis-Komunis. Pada tingkat Asia, Republik Rakyat Cina, Korea Utara adalah penganut-penganut ideologi Marxis-Komunis.

Lingkungan strategis yang terjadi secara nasional juga terjadi, antara lain terbelahnya rakyat dari negara-negara nasional karena pengaruh dari kekuatan ideologi yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh di dalam negara nasional yang bersangkutan. Kekuatan-kekuatan partai di negara-negara nasional, secara internal masing-masing menganut ideologi masing-masing. Ada partai yang menganut ideologi liberalistik dan ada pula yang menganut ideologi marxis-komunistik. Dalam kasus Republik Indonesia, secara resmi Republik Indonesia – sejak awal kemerdekaan – sudah menyatakan diri sebagai negara yang menganut azas politik luar negeri yang bersifat netral – bebas aktif. Tetapi di dalam perkembangan prakteknya ada periode di mana nampak “kecenderungan” kepada salah satu kekuatan ideologi tertentu. Pada periode pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1960-1966) yang dipimpin oleh Pemimpin Besar Revolusi, Presiden Soekarno, para Pengamat, terutama Pengamat-pengamat Barat, pemerintah Republik Indonesia condong ke kekuatan Blok Timur (ideologi Marxis-Komunis). Sebaliknya setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI, 1965, maka periode pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, dianggap lebih condong ke kekuatan ideologis Liberal-Kapitalistik.

Tetapi periode Perang Dingin itu, setelah berlangsung selama ±40-45 tahun, kemudian berakhir.



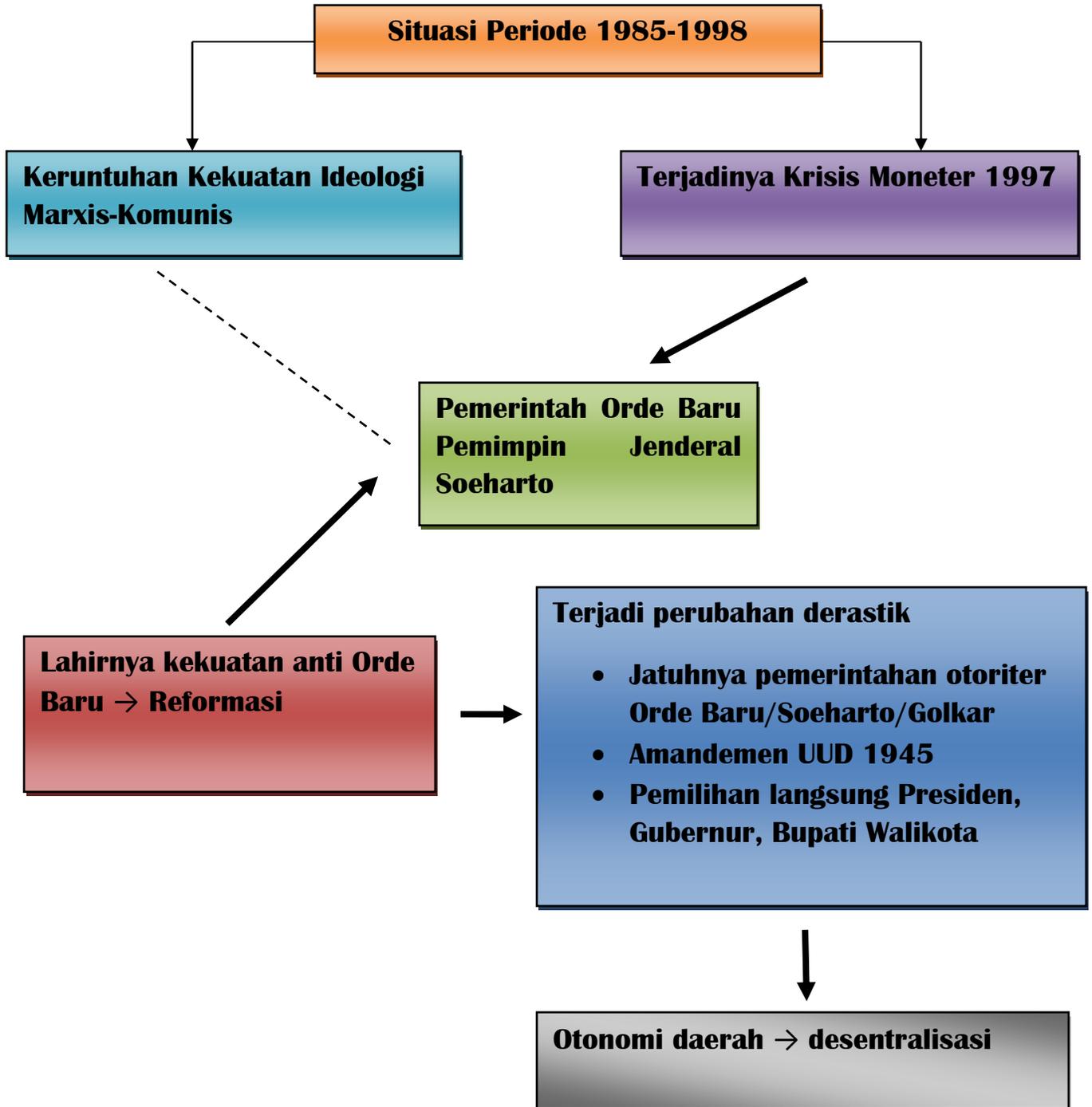
Hal itu terjadi karena sekretaris Jenderal Partai Komunis Unie-Sovyet ,Perdana Menteri Mikhail Gorbachov yang mengintrodusir idenya : Glasnost dan Prestroika pada akhirnya melahirkan krisis yang “meruntuhkan” kekuasaan kekuatan partai-partai komunis. Krisis di Unie Sovyet ini akhirnya menyebar ke seluruh negara-negara Eropa Timur. Tembok yang memisahkan dua Jerman : Jerman Barat dan Jerman Timur diruntuhkan. Dalam jangka waktu singkat, negara-negara Marxis-Komunis beralih ideologi menjadi “Kapitalis-Liberalistik”.



Dampak global dari sikap M. Gorbachov itu ialah negara-negara bekas Marxis-Komunis berusaha mengembangkan diri dengan menciptakan sistem pemerintahan “yang lebih terbuka” dan menciptakan sistem ekonomi kapitalisme “ala Amerika-Eropa Barat”. Walaupun demikian, Republik Rakyat Cina melakukan perubahan yang berbeda dengan apa yang terjadi di Eropa Timur. Di bawah arahan Deng Shio Ping Republik berpendudukan terbanyak ini tetap mempertahankan ideologi

komunismenya, tetapi yang diubah secara drastik ialah sistem ekonominya. Pemerintah Komunis Republik Cina ini tetap mempertahankan sistem pemerintahan dengan Partai Komunis yang berkuasa, tetapi sistem ekonominya menjadi sistem ekonomi “Kapitalis”. Dan dalam konteks waktu sekarang, Republik Rakyat Cina telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan politik dan mempunyai pengaruh dalam arti lingkungan strategis. Setidaknya ada dua hal yang penting, dilihat dari lingkungan strategis, dari langkah-tindak Republik yang berpenduduk terbanyak ini, yaitu pertama, persoalan Laut Cina Selatan, dan kedua, penciptaan kembali jalan sutra, jalan ekonomi kuno, ribuan tahun yang lalu.

Sampai seberapa jauh pengaruh dari perubahan globalis dalam arti pengaruh lingkungan strategis terhadap pemerintah Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto. Antara 1985-1997 telah terjadi berbagai peristiwa politik dan ekonomi.

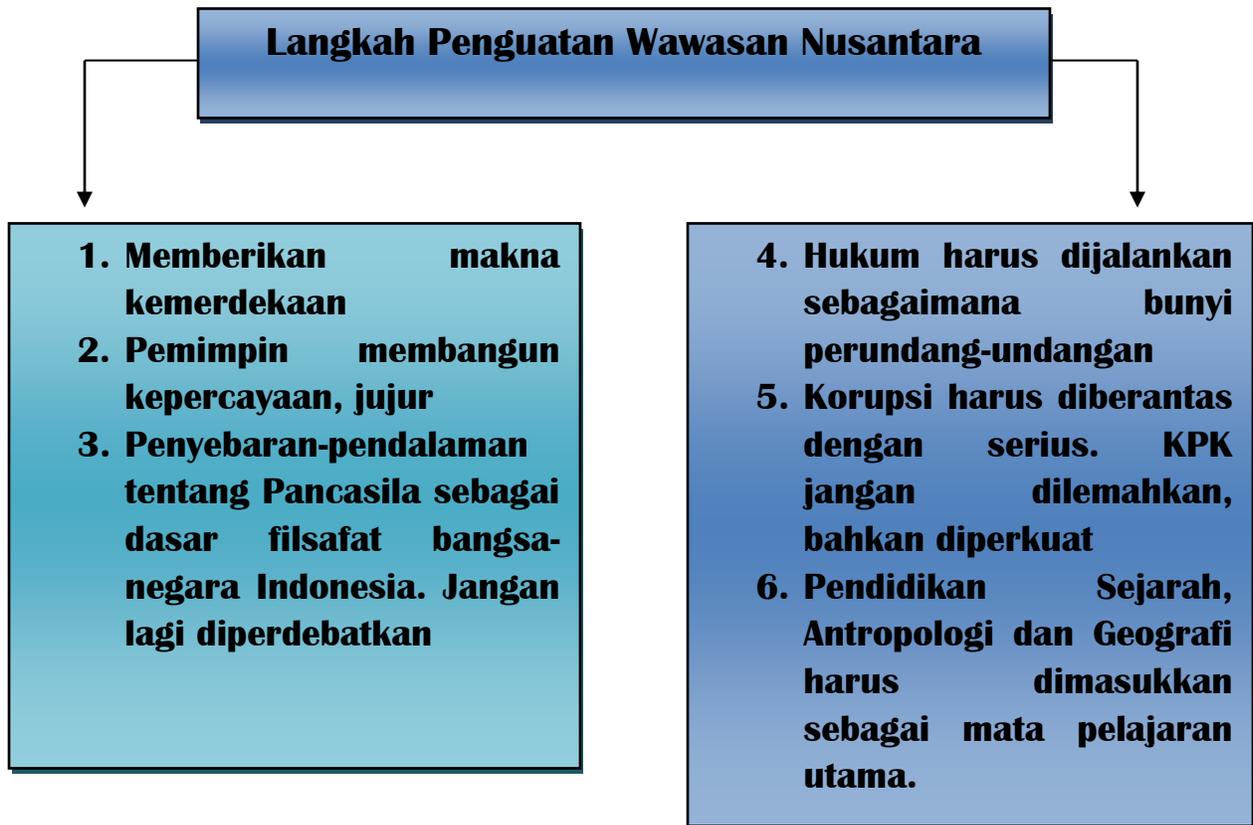


#### **4. Penutup : Penguatan Wawasan Kebangsaan**

Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai bangsa-negara Indonesia, maka akan selalu terjadi perubahan, baik yang berlangsung secara wajar maupun yang terjadi secara drastik, seperti yang pernah kita alami dengan terjadinya krisis moneter 1997. Dampaknya ialah jatuhnya pemerintah Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto pada bulan Mei 1998. Kemudian terjadi tsunami di Aceh dan juga Yogyakarta serta meletusnya Gunung Merapi. Di dalam menghadapi pelbagai perubahan dengan kemungkinan dampak yang dilahirkannya, termasuk kemungkinan dampak “negatifnya” terhadap Wawasan Kebangsaan”, perlu usaha penguatan Wawasan Kebangsaan kita.

Di dalam kaitan itu, maka memang diperlukan langkah-langkah konkrit untuk penguatan Wawasan kebangsaan itu. Dalam penglihatan saya, maka penguatan Wawasan Kebangsaan itu dapat dilakukan, antara lain :

- 1) Memberikan makna terhadap Kemerdekaan.
- 2) Penyebaran pendalaman tentang posisi Pancasila sebagai dasar-filsafat bangsa-negara, dari semua tingkatan masyarakat, dari pemimpin politik, pengusaha, pejabat, tetapi juga ada usaha untuk menjangkau rakyat pada umumnya.
- 3) Pemimpin-pemimpin pada semua level harus berusaha sekuat-kuatnya untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Kepercayaan yang dimaksud bukanlah bangunan kepura-puraan, kejujuran.
- 4) Hukum dalam arti yang tertuang di dalam perundang-undangan harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang dimaksud oleh “bunyi” kata ketentuan perundang-undangan itu.
- 5) Korupsi harus diberantas secara serius karena kalau korupsi terus dibiarkan terjadi – walau KPK telah bekerja sekuat-kuatnya, saya percaya akan merusak kelangsungan hidup bersama kita sebagai bangsa-negara merdeka.
- 6) Pada tingkat pendidikan terutama pada tingkat Sekolah Dasar dan Menengah, Sejarah, Etnologi/Antropologi dan Geografi harus masuk dalam kurikulum pada posisi yang dianggap penting dan utama.



Demikianlah uraian kami dan mudah-mudahan ada manfaatnya.